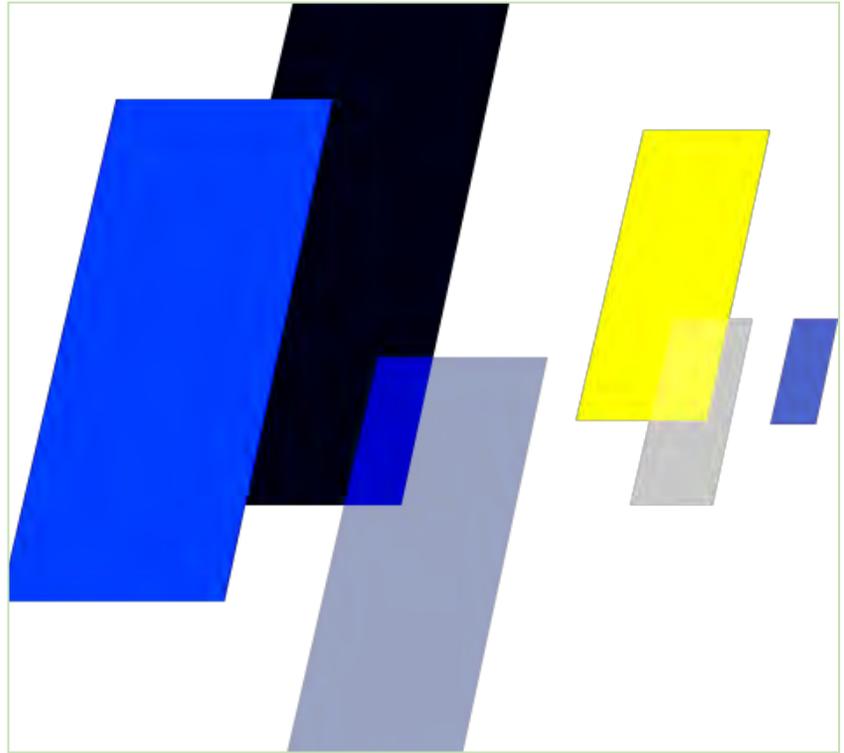




**LKjIP  
2021**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun;
3. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat;
4. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah dengan membandingkan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD;
5. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus

manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan;

6. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Isu Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas adalah 17,52%. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58%, dan angka kemiskinan Nasional sebesar 11,22%. Permasalahan kemiskinan tidak lepas dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dari sisi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, dapat dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2018-2020 menunjukkan kenaikan. Dengan Kejadian luar biasa pandemic COVID-19 pemerintah daerah Kabupaten Banyumas telah mengubah target indikator persentase penduduk miskin Tahun 2021 s.d. tahun 2023. Untuk tahun 2021 target persentase penduduk miskin berubah dari 10,54 % menjadi 12,51 %, namun pencapaian tahun 2021 sebesar 13,66 % atau hanya 90,81 % dari target.

Isu Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas mendasari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023. Kabupaten Banyumas memiliki berbagai potensi daerah yang dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa sumber daya alam, penduduk sebagai sumber tenaga kerja, sumber daya buatan yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun sumber daya sosial yang berupa kelembagaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pengembangan seluruh potensi atau sumber daya tersebut dapat menciptakan berbagai peluang usaha untuk dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat, dan diharapkan akan menimbulkan dampak ikutan (multiplier effect) yang luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mampu mengidentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkannya secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah akan menyebabkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan daerah karena keterbatasan pendapatan daerah, lambatnya pertumbuhan

ekonomi daerah, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai salah satu instansi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

## B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

## C. TUJUAN

Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Tujuan evaluasi capaian kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Peningkatan akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas;
3. Umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien;

5. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*);
6. Upaya berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS

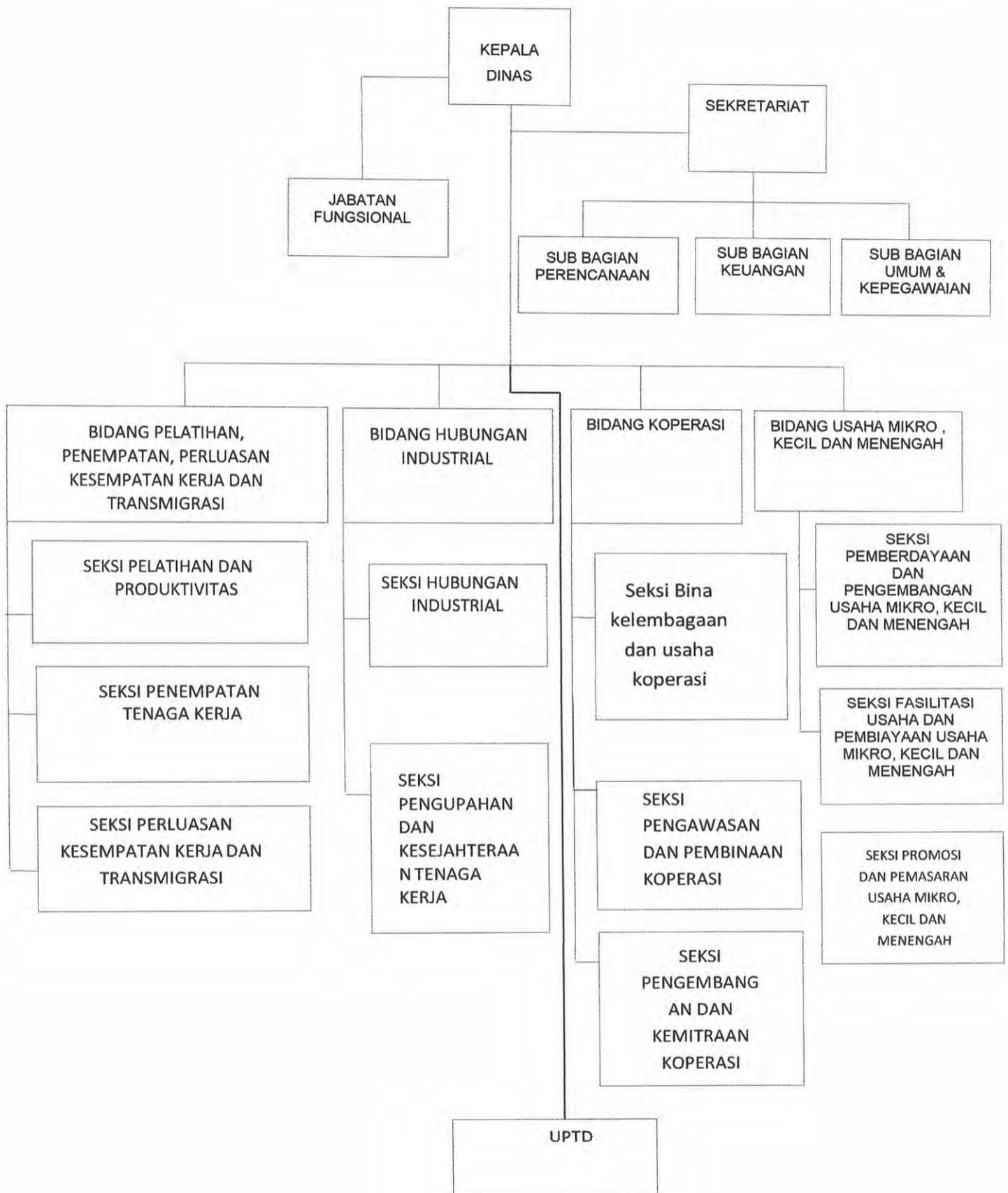
1. Struktur Organisasi, Uraian Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang P3K2T terdiri dari :
  1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
  2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang HI, terdiri dari :
  1. Seksi Hubungan Industrial;
  2. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Koperasi terdiri dari :
  1. Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
  2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi; dan
  3. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Koperasi.
- f. Bidang UMKM terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
  2. Seksi Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
  3. Seksi Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1 : STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN



b. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas:

- 1) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Transmigrasi yang merupakan kewenangan Daerah.
- 2) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi.

1) Tugas

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha mikro kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2) Fungsi.

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha mikro kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- d. evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Manusia.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah PNS
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	0	6		1
2	SMA Sederajat	6	5	12	5	11
3	D3	4	1	1	1	5
4	S1	8	15	17	8	23
5	S2	5	2	0	0	7
6	SD	1	0	3		1

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I			
2	Golongan II	7	3	10
3	Golongan III	17	10	27
4	Golongan IV	8	3	11
Jumlah				48

. Jumlah pejabat struktural sebanyak 18 orang yang terdiri dari :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Bidang : 4 orang
- Kepala UPT : 1 orang
- Kepala Seksi : 11 orang
- Kepala Sub Bagian : 3 orang
- Kepala Sub Bagian TU UPTD : 1 orang

## E. VISI DAN MISI

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah “**Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil - Makmur dan Mandiri**” Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM adalah :

- Misi kelima Bupati Banyumas yaitu “ Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan dan
- Misi ketujuh Bupati Banyumas yaitu “ Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.

## F. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

### 1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas dalam hal Ketenagakerjaan , Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

#### a. Tenaga kerja

- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja Kabupaten Banyumas
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih rendah
- Masih rendahnya kepesertaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan
- Masih adanya pengangguran terbuka
- Perlu menekan tingkat setengah pengangguran
- Perlunya meningkatkan kompetensi ketrampilan teknik, kejuruan, kewirausahaan bagi tenaga kerja
- Masih rendahnya besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
- Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama
- Presentase meningkatkan tenaga kerja informal
- Peningkatan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
- Perlu meningkatkan PDRB perkapita

#### b. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Masih banyaknya koperasi yang tidak sehat
- Masih rendahnya UMKM yang bersertifikat halal
- Akses permodalan bagi UMKM masih kurang
- Belum optimalnya desa yang menghasilkan produk unggulan
- Masih rendahnya presentase pertumbuhan usaha mikro
- Masih rendahnya omzet usaha mikro yang dibina
- Akses UMKM kelayanan keuangan dan proporsi terhadap total kredit

#### c. Transmigrasi

- Minat masyarakat untuk bertransmigrasi rendah, dan tebatasnya kuota transmigran

## 2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan.

Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang telah mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dapat melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal, sehingga kebijakan pemerintah daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif, pemerintah daerah mampu meraih peluang-peluang penting, serta mampu mengantisipasi ancaman yang tidak dikenali.

Sumber informasi bagi perumusan isu strategis bisa diperoleh dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain lain), kebijakan skala regional, nasional, dan internasional, yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan. Informasi tersebut merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukandalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu global, nasional, maupun regional yang teridentifikasi sebagai berikut:

**Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah**

<b>Isu Global (SDG's)</b>	<b>Isu Nasional ( RP JMN)</b>	<b>Isu Strategis RP JMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023</b>	<b>Isu Strategis RP JDP 2018-2023</b>	<b>Isu Strategis KLHS RP JMD 2018-2023</b>	<b>Isu Strstegis RP JMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemiskinan</li> <li>2. Pangan dan Gizi</li> <li>3. Kesehatan</li> <li>4. Pendidikan</li> <li>5. Gender</li> <li>6. Air bersih dan sanitasi</li> <li>7. Energi</li> <li>8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja</li> <li>9. Infrastruktur</li> <li>10. Kesenjangan</li> <li>11. Kota dan pemukiman</li> <li>12. Produksi dan konsumsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilitas politik dan keamanan</li> <li>2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien</li> <li>3. Pemberantasan korupsi</li> <li>4. Pertumbuhan ekonomi</li> <li>5. Percepatan pemerataan dan keadilan</li> <li>6. Keberlanjutan pembangunan</li> <li>7. Peningkatan kualitas SDM</li> <li>8. Kesenjangan antar wilayah</li> <li>9. Percepatan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan kemiskinan</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</li> <li>3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</li> <li>4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam</li> <li>5. Kedauletan pangan dan energi</li> <li>6. Kesenjangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosial budaya dan kehidupan beragama</li> <li>2. Ekonomi</li> <li>3. Sarana dan prasarana</li> <li>4. Tata pemerintahan, politik dan hukum</li> <li>5. Ketertiban dan keamanan</li> <li>6. Pertanahan dan penataan ruang</li> <li>7. Sumber daya air dan lingkungan hidup</li> <li>8. Ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemiskinan</li> <li>2. Akses terhadap infrastruktur pemukiman (air minum dan sanitasi), perumahan dan energi</li> <li>3. Pendidikan</li> <li>4. Kesehatan</li> <li>5. Kualitas SDM</li> <li>6. Ketahanan pangan</li> <li>7. Kesetaraan gender an jaminan sosial</li> <li>8. Pengangguran</li> <li>9. Akses penduduk terhadap teknologi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas sumber daya manusia</li> <li>2. Ketersediaan infrastruktur</li> <li>3. Pengembanganb potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat</li> <li>4. Kemiskinan dan pengangguran</li> <li>5. Pertanian mendukung kedauletan pangan</li> <li>6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan</li> <li>7. Tata kelola pemerintahan</li> </ol>

berkelanjutan 13. Perubahan iklim 14. Sumberdaya kelautan 15. Ekosistem daratan 16. Masyarakat inklusif dan damai, dan membangun kelembagaan 17. Kemitraan global	kelautan	wilayah 7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah		informasi 10. Tata kelola pemerintahan 11. Rendahnya presentase PAD terhadap pendapatan 12. Resiko bencana dan kerentanan terhadap perubahan iklim 13. Penurunan lahan pertanian mengancam produksi pangan pokok adn daya dukung pangan 14. Penurunan daya dukung lingkungan	
--	----------	---	--	---	--

Isu strategis nasional merupakan gambaran makro dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam lingkup kabupaten apa yang menjadi isu nasional belum tentu menjadi isu daerah dikarenakan kondisi dan potensi wilayah yang berbeda-beda, seperti isu percepatan pembangunan kelautan yang tidak relevan dengan kondisi wilayah Kabupaten Banyumas yang tidak memiliki laut. Isu strategis nasional lainnya yang tidak menjadi isu strategis daerah adalah isu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian tidak semua isu strategis nasional memiliki keterkaitan dengan isu strategis daerah.

Dengan mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional, dan daerah isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas yang terkait ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Perekonomian Kabupaten Banyumas sangat terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2021 termasuk pada sektor unggulan Kabupaten Banyumas (industri pengolahan, perdagangan dan jasa). Terjadinya pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor tenaga kerja, dimana kesempatan berusaha atau bekerja masyarakat menjadi berkurang karena banyak usaha yang tidak beroperasi sehingga pemanfaatan tenaga kerja berkurang baik jumlah atau waktunya.

Penurunan aktifitas usaha sektor perekonomian dimasa pandemi Covid-19 juga ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, penurunan pendapatan para pelaku usaha terutama di bidang pertanian akibat penurunan daya beli masyarakat, pasokan, ketidakpastian harga, pembatasan mobilitas pelaku usaha dan petani, pembatasan distribusi sarana, produksi pertanian dan produksi hasil pertanian; pembatasan kunjungan disektor pariwisata, pembatasan transportasi dan tertundannya pembangunan infrastruktur.

Isu penting dalam peningkatan daya saing dan kesempatan berusaha diantaranya adalah meningkatkan peluang wirausaha, usaha kerakyatan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi terutama pada sektor-sektor perekonomian yang cukup bertahan dimasa pandemi Covid-19 seperti sektor koperasi, usaha mikro, dan industri kecil dengan mendorong peningkatan usahannya melalui online atau jasa antar.

Permasalahan pengembangan potensi daerah adalah belum teridentifikasinya seluruh potensi Kabupaten Banyumas yang ada agar dapat dikembangkan secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat

menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengembangan usaha mikro merupakan salah satu potensi daerah yaitu dalam hal pembiayaan modal usaha, sumber daya manusia dan kurang memiliki kemampuan manajerial serta promosi produk yang kurang menarik.

Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Banyumas berupaya untuk menumbuhkembangkan melalui program dan kegiatan yang mendorong dan meningkatkan koperasi dan usaha mikro kecil serta pengembangan aktivitas ekonomi kreatif dan pariwisata.

- Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas, meskipun dari tahun ketahaun mengalami penurunan namun pada tahun 2021 justru mengalami kenaikan. Meningkatnya kemiskinan pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang memberi dampak multisektoral. Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas sebesar 12,53%. Sedangkan tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas sehingga angka kemiskinan menjadi 13,26%. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kenaikan angka kemiskinan tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 5,83%.

Isu kemiskinan penduduk Kabupaten Banyumas terkait akses pelayanan dasar antara lain akses rumah layak, pangan, pendidikan dan kesehatan dan juga kesempatan berusaha dan bekerja, aspek ketrampilan dan produktifitas kelompok serta belum terintegrasinya sasaran program dan kegiatan serta lokasi intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 4,17 sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar 6. Kenaikan tingkat pengangguran juga dikarenakan dampak Covid-19 yang mengakibatkan adanya pengurangan tenaga kerja ataupun pemutusan hubungan kerja di banyak perusahaan. Tantangan pengurangan pengangguran adalah bagaimana meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penanaman modal yang sehat dan kompetitif.

## G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, Latar belakang, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan LKjIP.

### Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III : Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

Perjanjian Kinerja

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS**

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018-2023. Pelaksanaan Rencana Strategis periode 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan. Secara ringkas Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 (RKT). Rencana Kinerja Tahunan tersebut memuat sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 1 (satu) tahun, indikator dan target kinerja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran strategis yang bersangkutan. Sejalan dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 dalam rangka mewujudkan target yang tertuang di dalam RKT, maka disusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2021.

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang dibuat pada awal tahun 2021, 2 sasaran strategis yang dijadikan Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas

TUJUAN			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<b>Formulasi</b> : Jumlah penduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Sakernas BPS
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	<b>Formulasi</b> : Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Data Koperasi Kab. Banyumas
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	<b>Formulasi</b> : Jumlah usaha mikro tahun n dikurangi Jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Data UMKM Kab. Banyumas

SASARAN			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan
1	Meningkatnya Angkatan Kerja	Prosentase Angkatan Kerja	<b>Formulasi</b> : Jumlah angkatan kerja tahun n dikurangi angkatan kerja tahun n-1 dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Sakernas BPS
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	<b>Formulasi</b> : Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi terdaftar dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Data Koperasi Kab. Banyumas
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	<b>Formulasi</b> : Jumlah usaha mikro tahun n dikurangi Jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Data UMKM Kab. Banyumas

Sumber: Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran strategis yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan sasaran di dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sasaran pada misi kelima dan ketujuh RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang berbunyi: “ Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan” dan ” Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal ” .

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian atau tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan ukm serta transmigrasi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Banyumas.

### C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat eselon di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai penerima amanah, dimana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 (RKT) selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2021 yang dibuat pada awal tahun memuat 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang diampu oleh 10 program dan total anggaran induk **Rp. 14.043.680.155,-**

Di tahun 2021, telah terjadi wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Covid 19. Berawal dari Wuhan China, akhirnya penyakit menular merambah masuk ke Indonesia. Tepatnya sejak bulan Maret 2020 wabah tersebut mulai menyebar di Indonesia, sehingga Pemerintah mulai dari Pusat hingga Daerah mulai mengantisipasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebarannya. Kebijakan yang dilaksanakan termasuk dalam hal pembatasan kegiatan dan adanya pergeseran dan *refocusing* anggaran sepanjang tahun 2021. *Refocusing* dilaksanakan dengan mengurangi dan memotong bahkan menghilangkan anggaran yang telah dipasang pada tiap program maupun kegiatan di setiap Perangkat Daerah. Di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, pergeseran dan *refocusing* anggaran merubah anggaran total menjadi **Rp. 12.310.428.383,-** pada bulan Mei 2021.

Selanjutnya pada Bulan Oktober 2021 ditetapkanlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dengan berjumlah 10 program, sehingga total anggaran perubahan belanja langsung yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 10.782.857.230,-**

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2021 memuat perjanjian kinerja yang akan dicapai baik sesuai indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis maupun anggaran yang telah disahkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021

<b>TUJUAN</b>					
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<b>Formulasi</b> : Jumlah penduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Sakernas BPS	%	66,66
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	<b>Formulasi</b> : Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Data Koperasi Kab. Banyumas	%	28,88
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	<b>Formulasi</b> : Jumlah usaha mikro tahun n dikurangi Jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Data UMKM Kab. Banyumas	%	0,244
<b>SASARAN</b>					
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Angkatan Kerja	Prosentase Angkatan Kerja	<b>Formulasi</b> : Jumlah angkatan kerja tahun n dikurangi angkatan kerja tahun n-1 dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Sakernas BPS	%	66,66

2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	<b>Formulasi</b> : Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi terdaftar dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Data Koperasi Kab. Banyumas	%	81,18
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	<b>Formulasi</b> : Jumlah usaha mikro tahun n dikurangi Jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100 persen <b>Tipe perhitungan</b> : Non Kumulatif <b>Sumber Data</b> : Data UMKM Kab. Banyumas	%	0,244

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.3

Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Program	Anggaran
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 557.095.775
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 42.651.800
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 52.256.900
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 9.307.321.795
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 3.559.900
6	Program Penilaian Kesehatan Ksp/usp Koperasi	Rp. 7.303.100
7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 5.231.800
8	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 16.281.500
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (umkm)	Rp. 650.297.750
10	Program Pengembangan Umkm	Rp. 140.856.910
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10.782.857.230</b>

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator kinerja yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas merujuk pada Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang termasuk dalam indikator kinerja. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja di atas juga berdasarkan pada target tahun 2021 yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS**

###### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, dengan 3 indikator kinerja utama yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, mengampu 9 program dimana secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis. Program yang secara langsung dan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian 3 indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan Ksp/usp Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha, Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (umkm) dan Program Pengembangan UMKM.

Target realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

<b>TUJUAN</b>					
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,66%	65,07%	97,61%
2.	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	28,88%	47,06%	162,95 %
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,244%	0,273%	111,89%
<b>SASARAN</b>					
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Meningkatnya Angkatan Kerja	Prosentase Angkatan Kerja	66,66%	65,07%	97,61%
2.	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	81,18 %	87,27%	107,50%
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,244%	0,273%	111,89%

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 didasarkan pada pencapaian Tahun 2021.

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan capaian yang didapat di tahun 2020 maka dengan ini kami paparkan realisasi dan Capaian Kinerja ( IKU ) di tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2020

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,47%	66,66%	100,25%
2.	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	30,25%	22,40%	74,05%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	0,47%	0,48%	102,13%

2. Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.2

Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas  
Tahun Anggaran 2021

TUJUAN					
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Rp.652.004.475	Rp.418.333.251	64,16
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	Rp32.376.300	Rp32.375.030	100
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Rp791.154.660	Rp756.616.150	95,63
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.475.535.435,-</b>	<b>Rp. 1.207.324.431,-</b>	
SASARAN					
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
1	Meningkatnya Angkatan Kerja	Prosentase Angkatan Kerja	Rp.652.004.475	Rp.418.333.251	64,16
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	Rp32.376.300	Rp32.375.030	100
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Rp791.154.660	Rp756.616.150	95,63
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.475.535.435,-</b>	<b>Rp. 1.207.324.431,-</b>	

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, direncanakan anggaran sebesar Rp1.475.535.435,- Dari rencana anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran Dinas terealisasi sebesar Rp. 1.207.324.431,- atau 81,82 % dari anggaran yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tabel 3.2 didukung secara langsung oleh Program yang dilaksanakan ditahun 2021.

Walaupun demikian, pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja,

Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas tidak dapat dilihat secara parsial karena selain program yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja sasaran juga terdapat program-program lain yang memiliki peran serta dalam mewujudkan kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas secara optimal. Berikut adalah realisasi anggaran dari program-program yang turut berperan serta dalam pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.4  
Realisasi Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan Capaian ( % )
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 557.095.775	Rp. 324.320.326	58,22
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 42.651.800	Rp. 42.508.200	100
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 52.256.900	Rp. 51.504.725	98,56
4	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 3.559.900	Rp. 3.559.900	100
5	Program Penilaian Kesehatan Ksp/usp Koperasi	Rp. 7.303.100	Rp. 7.303.100	100
6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 5.231.800	Rp. 5.231.800	100
7	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 16.281.500	Rp. 16.280.230	100
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (umkm)	Rp. 650.297.750	Rp. 628.251.240	96,61
9	Program Pengembangan Umkm	Rp. 140.856.910	Rp. 128.364.910	91,13
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.475.535.435,-</b>	<b>Rp. 1.207.324.431,-</b>	

Sebagai bahan pertimbangan realisasi anggaran program di tahun 2021 maka kami paparkan realisasi anggaran program Realisasi Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Rp3.368.915.543	Rp2.772.780.682	82,3
2	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Rp53.649.000	Rp41.402.179	77,17
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp1.160.802.000	Rp968.513.998	83,43
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp193.463.576	Rp189.989.479	98,2
5	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp107.656.457	Rp107.634.940	99,98
6	Program perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Rp35.750.876	Rp34.560.241	96,67
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp495.594.701	Rp319.375.548	64,44
8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp471.643.763	Rp433.947.134	92,01
9	Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi	Rp20.000.000	Rp19.121.075	95,61
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp5.907.475.916</b>	<b>Rp4.887.325.276</b>	<b>82,73%</b>

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa terdapat 9 program yang turut berperan serta dalam mewujudkan pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas karena pelaksanaan 9 program tersebut secara sistematis memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Perwujudan akuntabilitas keuangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, selain tercermin dari realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran.

### 3. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis

Efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6  
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021

<b>TUJUAN</b>				
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	
			<b>Rp</b>	<b>%</b>
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	97,61	Rp.418.333.251	64,16
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	137,42	Rp.788.991.180	95,80
<b>Jumlah</b>			<b>Rp1.207.324.431</b>	
<b>SASARAN</b>				
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	
			<b>Rp</b>	<b>%</b>
1	Meningkatnya Angkatan Kerja	97,61	Rp.418.333.251	64,16
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	109,695	Rp788.991.180	95,80
<b>Jumlah</b>			<b>Rp1.207.324.431</b>	

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas diwujudkan melalui 3 Indikator Kinerja Utama.

### 4. Analisa dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis secara optimal dapat dilihat dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7  
Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021

<b>TUJUAN</b>				
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi (%)</b>
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	97,61	64,16	-
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	137,42	95,80	41,62
<b>SASARAN</b>				
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi (%)</b>
1	Meningkatnya Angkatan Kerja	97,61	64,16	-
2	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	109,69	95,80	13,89

Mendasari hasil capaian dari Indikator Tujuan pertama yaitu Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja analisa belum tercapainya indikator tersebut belum 100 persen disebabkan oleh :

- TPAK Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.  $TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15thn keatas}} \times 100\%$
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK diantaranya adalah :
  1. Investasi
  2. Rendahnya kesempatan kerja
  3. Pendidikan
  4. Status perkawinan
  5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (kenaikan PDRB akan menaikkan TPAK)

Bahwa tahun 2021 TPAK Kabupaten Banyumas adalah 65,07 dengan angkatan kerja sejumlah 865.982 orang (L= 531.560 dan P=334.422) TPAK masih belum memenuhi target karena Pandemi covid 19 masih berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja, yaitu :

1. Alumni/lulusan khususnya SMK/SMA dan Perguruan Tinggi dengan

jumlah pertahun cukup tinggi (jumlah SMK = 82 SMK, Perguruan Tinggi 8 PT) belum tersalurkan secara maksimal karena :

- a. Perusahaan yang ada masih dalam kondisi pemulihan dampak pandemi yaitu dampak dari pembatasan-pembatasan yang menyebabkan adanya gelombang PHK dan merumahkan baik di Kab. Banyumas maupun di luar Kab. Banyumas, berkurangnya order dari buyer dan naiknya cost produksi."
  - b. Perusahaan-perusahaan yang bersifat padat karya yang biasa bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus baik di Sekolah Kejuruan dan Perguruan Tinggi masih membatasi penerimaan pekerja.
2. Adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dikarenakan belum semua negara menerima pekerja dari luar negara, misalnya Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang yang sebelumnya adalah merupakan negara yang paling banyak diminati oleh pencari kerja ke luar negeri asal Banyumas."

Adapun langkah langkah yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator adalah :

1. Melakukan Job Fair Virtual, dengan peserta perusahaan baik dari Kabupaten Banyumas maupun luar Kab. Banyumas
2. Mendorong Bursa Kerja Khusus melaksanakan Job Fair Virtual untuk memfasilitasi khususnya alumninya dalam mencari kesempatan kerja.
3. Dengan keterbatasan akibat pandemi, Dinas memaksimalkan job canvassing secara virtual.
4. Melakukan kerjasama dengan perusahaan di luar Kabupaten Banyumas, khususnya perusahaan padat karya untuk memfasilitasi penyaluran alumni Sekolah Kejuruan.
5. Mengutakan Bursa Kerja Khusus dan Lembaga Penempatan lainnya dengan mendorong untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun luar Kabupaten Banyumas.
6. Memperkuat penyebaran informasi lowongan kerja melalui media sosial untuk memudahkan penyebaran informasi.
7. Menjalin komunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan daerah lain, APINDO dan HRD baik dari Kabupaten Banyumas maupun luar Kabupaten Banyumas untuk informasi-informasi lowongan kerja.
8. Mensosialisasikan website-website dan media sosial resmi dalam pencarian lowongan kerja kepada masyarakat khususnya pencari kerja.

9. Telah membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) untuk memaksimalkan penyerapan alumni pelatihan pada dunia industri.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Tabel 4.1  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021

<b>TUJUAN</b>					
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,66%	65,07%	97,61%
2.	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	28,88%	47,06%	162,95 %
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,244%	0,273%	111,89%
<b>SASARAN</b>					
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Meningkatnya Angkatan Kerja	Prosentase Angkatan Kerja	66,66%	65,07%	97,61%
2.	Meningkatnya usaha dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	81,18 %	87,27%	107,50%
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,244%	0,273%	111,89%

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2021 secara garis besar di Bidang Koperasi dan UMKM sudah dapat dikatakan baik dengan capaian Persentase Koperasi Sehat dan Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro. Hal ini dipengaruhi oleh upaya Dinas dalam meningkatkan peran Dinas secara berkesinambungan terhadap seluruh stakeholder Koperasi maupun Usaha Mikro dengan didukung oleh Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Kesehatan Ksp/usp Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha, Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (umkm) dan Pengembangan UMKM.

Adapun Capaian Kinerja pada Tujuan Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja masih harus terus dilakukan perbaikan dari dan pengembangan menjadi lebih baik di masa mendatang. Beberapa langkah langkah yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator adalah :

1. Melakukan Job Fair Virtual, dengan peserta perusahaan baik dari Kabupaten Banyumas maupun luar Kab. Banyumas
2. Mendorong Bursa Kerja Khusus melaksanakan Job Fair Virtual untuk memfasilitasi khususnya alumninya dalam mencari kesempatan kerja.
3. Dengan keterbatasan akibat pandemi, Dinas memaksimalkan job canvassing secara virtual.
4. Melakukan kerjasama dengan perusahaan di luar Kabupaten Banyumas, khususnya perusahaan padat karya untuk memfasilitasi penyaluran alumni Sekolah Kejuruan.
5. Mengutakan Bursa Kerja Khusus dan Lembaga Penempatan lainnya dengan mendorong untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun luar Kabupaten Banyumas.
6. Memperkuat penyebaran informasi lowongan kerja melalui media sosial untuk memudahkan penyebaran informasi.
7. Menjalin komunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan daerah lain, APINDO dan HRD baik dari Kabupaten Banyumas maupun luar Kabupaten Banyumas untuk informasi-informasi lowongan kerja.
8. Mensosialisasikan website-website dan media sosial resmi dalam pencarian lowongan kerja kepada masyarakat khususnya pencari kerja.

9. Telah membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) untuk memaksimalkan penyerapan alumni pelatihan pada dunia industri.

Purwokerto, Januari 2022

Kepala DINNAKERKOPUKM  
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. JOKO WIYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196602171993031002